DAFTAR PUSTAKA

- Aryastami, N. (2022). Studi tentang prevalensi stunting di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. (2022). *Laporan prevalensi stunting di Kota Bengkulu tahun 2022*. Bengkulu: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
- Dwi, R. (2022). Strategi penyuluhan gizi dalam pencegahan stunting di Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gunawan, H. (2019). Peran pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hermawan, T. (2022). *Pengaruh anggaran terhadap kebijakan pencegahan stunting di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Kebijakan Publik.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lasswell, H. D. (1949). *The policy sciences: Recent developments in scope and method*. Stanford University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan publik: Teori, manajemen, dan strategi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Darmi, Titi. (2017). "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Panjang Di Kota Bengkulu." *Jurnal Public Policy*, Vol. 3, No. 2,

- hlm. 45–54. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2018). Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3

 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu.
- Pratama, B. (2020). Efektivitas kebijakan penurunan stunting di Indonesia: Analisis koordinasi antarinstansi. Jakarta: Salemba.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri, S., et al. (2018). Faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam prevalensi stunting di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kualitatif untuk ilmu sosial dan pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sari, R., et al. (2021). Analisis kebijakan pencegahan stunting di daerah tertinggal: Studi kasus Indonesia Timur. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
- Sahara, Feny, Faizal Anwar, dan Titi Darmi. 2022. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu." *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 4(2): 107–115.
- World Health Organization. (2022). Global nutrition report: Progress towards nutrition targets. Geneva: WHO.

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BENGKULU

Informan: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

I. Waktu

Hari/Tanggal : 25 Maret 2025

Tempat : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

II. Identitas Informan

Nama: Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S2

III. Pertanyaan

• Indikator: Kualitas Kerja

- 1. Bagaimana struktur dan peran TPPS di Kota Bengkulu dalam pencegahan stunting?
- 2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program antar OPD?
- 3. Bagaimana Anda menilai koordinasi teknis di lapangan?
- Indikator: Kuantitas
 - 1. Berapa jumlah personel TPPS dan apakah jumlah tersebut mencukupi?
 - 2. Apakah beban kerja dalam pelaksanaan program seimbang?

- 3. Apakah pelaksana di kecamatan dan kelurahan aktif menjalankan fungsi mereka?
- Indikator: Relevansi
 - Apakah kebijakan dan pedoman pusat dapat diterapkan di kondisi lokal?
 - 2. Bagaimana relevansi program nasional dengan tantangan di lapangan?
 - 3. Apakah pelaksana memahami arah kebijakan yang ditetapkan?
- Indikator: Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Apa bentuk evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan program?
 - 2. Bagaimana pelaporan dari Puskesmas dan Posyandu dikumpulkan dan diolah?
 - 3. Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan secara konsisten?
- Indikator: Dukungan Sumber Daya
 - 1. Berapa besar dukungan anggaran untuk program stunting di tiga tahun terakhir?
 - 2. Apakah fasilitas dan logistik untuk pelaksana tersedia?
 - 3. Bagaimana keterlibatan pemerintah pusat dan donor eksternal?

PANDUAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BENGKULU

Informan: Kepala Puskesmas Betungan

I. Waktu

Hari/Tanggal : 25 Maret 2025

Tempat : Puskesmas Betungan

II. Identitas Informan

Nama : Aan Rachma Evwany, Amd. AK., SKM

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

III. Pertanyaan

• Indikator: Kualitas Kerja

- 1. Apa saja kegiatan utama Puskesmas dalam upaya pencegahan stunting?
- 2. Bagaimana pelaksanaan kelas ibu hamil dan penyuluhan gizi di wilayah kerja Anda?
- 3. Sejauh mana keterlibatan tim kesehatan dalam memantau tumbuh kembang anak?
- Indikator: Kuantitas
 - 1. Berapa jumlah petugas gizi dan kader yang Anda miliki saat ini?
 - 2. Apakah SDM tersebut mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah kerja?

3. Bagaimana pembagian beban kerja dalam menjalankan program?

• Indikator: Relevansi

- 1. Apakah program nasional seperti PMT dan ASI eksklusif sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah Anda?
- 2. Bagaimana Anda menyesuaikan pelaksanaan program agar efektif di wilayah kerja Anda?
- 3. Apakah masyarakat terbuka terhadap edukasi yang diberikan Puskesmas?

• Indikator: Monitoring dan Evaluasi

- 1. Apakah Anda memiliki sistem pemantauan dan evaluasi program stunting?
- 2. Bagaimana Anda melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi lapangan?
- 3. Seberapa sering dilakukan supervisi ke Posyandu oleh tim Puskesmas?

• Indikator: Dukungan Sumber Daya

- 1. Apakah alat ukur (antropometri) dan logistik tersedia dan layak pakai?
- 2. Bagaimana dukungan dari Dinas Kesehatan terhadap pelatihan dan operasional program?
- 3. Apakah Anda mengalami kendala dalam pengadaan logistik atau SDM?

PANDUAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BENGKULU

Informan : Kader Posyandu Mekar Melati 1

I. Waktu

Hari/Tanggal : 25 Maret 2025

Tempat : Kader Posyandu Mekar Melati 1, Kota Bengkulu

II. Identitas Informan

Nama : Rita Andriani

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan : -

III. Pertanyaan

• Indikator: Kualitas Kerja

- 1. Apa saja kegiatan rutin yang Anda lakukan dalam pelayanan Posyandu terkait stunting?
- 2. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi tentang stunting kepada ibu-ibu balita?
- 3. Apakah Anda merasa memiliki peran penting dalam mencegah stunting di lingkungan Anda?
- Indikator: Kuantitas
 - Berapa jumlah kader aktif yang bekerja bersama Anda di Posyandu?
 - 2. Apakah jumlah kader cukup untuk melayani jumlah balita yang ada di wilayah kerja Anda?

3. Berapa banyak anak yang dilayani setiap kali kegiatan Posyandu berlangsung?

• Indikator: Relevansi

- 1. Apakah materi penyuluhan dan informasi yang Anda sampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- 2. Bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan Posyandu yang Anda jalankan?
- 3. Apakah Anda melihat perubahan perilaku masyarakat setelah kegiatan edukasi gizi dilakukan?

• Indikator: Monitoring dan Evaluasi

- 1. Apakah Anda melakukan pencatatan tinggi dan berat badan anak secara rutin?
- 2. Bagaimana laporan kegiatan Posyandu disampaikan ke pihak Puskesmas?
- 3. Apakah Anda pernah mendapatkan umpan balik dari Puskesmas atas laporan yang diberikan?

• Indikator: Dukungan Sumber Daya

- 1. Apakah logistik seperti alat ukur dan makanan tambahan tersedia dalam setiap kegiatan?
- 2. Apakah Anda mendapatkan pelatihan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan secara berkala?
- 3. Apakah insentif dan dukungan lainnya cukup untuk memotivasi Anda sebagai kader?

PANDUAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BENGKULU

Informan: Ibu Balita (Penerima Program)

I. Waktu

Hari/Tanggal : 25 Maret 2025

Tempat : Betungan, Kota Bengkulu

II. Identitas Informan

Nama: AY

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan : -

- III. Pertanyaan
 - Indikator: Kualitas Kerja
 - 1. Bagaimana pelayanan yang Anda terima saat mengikuti Posyandu?
 - 2. Apakah kader ramah dan memberikan informasi yang Anda butuhkan?
 - 3. Apakah Anda merasa terbantu dalam pemantauan pertumbuhan anak?
 - Indikator: Kuantitas
 - 1. Seberapa sering Anda datang ke Posyandu setiap bulannya?
 - 2. Apakah semua balita di lingkungan Anda juga ikut Posyandu?
 - 3. Berapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan?
 - Indikator: Relevansi

- 1. Apakah informasi tentang stunting yang disampaikan kader sesuai dengan kebutuhan Anda?
- 2. Apakah makanan tambahan yang diberikan cocok untuk anak Anda?
- 3. Apakah Anda ingin materi penyuluhan disampaikan dengan cara yang berbeda?

• Indikator: Monitoring dan Evaluasi

- 1. Apakah Anda mencatat hasil penimbangan anak di KMS atau buku kesehatan?
- 2. Apakah kader pernah menindaklanjuti hasil pertumbuhan anak Anda?
- 3. Apakah Anda memahami hasil pengukuran dan saran yang diberikan?

• Indikator: Dukungan Sumber Daya

- Apakah Anda pernah menerima makanan tambahan dari Posyandu?
- 2. Apakah Anda merasa kesulitan mendapatkan makanan bergizi untuk anak?
- 3. Apakah bantuan yang Anda terima sudah mencukupi?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk
	wawancara kami. Bisa Bapak jelaskan bagaimana struktur TPPS
	di Kota Bengkulu dan bagaimana koordinasi pelaksanaan
	program penurunan stunting selama ini?
Informan	Selamat pagi. Dengan senang hati. Struktur TPPS sudah terbentuk
	dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan. TPPS di tingkat
	kota dipimpin oleh Wakil Walikota, kemudian di kecamatan oleh
	camat, dan di kelurahan dipimpin langsung oleh lurah. Koordinasi
	dilakukan lintas sektor, melibatkan berbagai OPD seperti Dinas
	Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan
	Perempuan. Namun, kami akui bahwa koordinasi masih belum
	berjalan optimal. Ada beberapa OPD yang masih kurang aktif
	berpartisipasi sehingga pelaksanaan program kadang tidak
	sinkron.
Penulis	Lalu bagaimana dengan jumlah pelaksana dan efektivitasnya di
	lapangan, Pak?
Informan	Kami menghadapi tantangan pada jumlah SDM yang terbatas. Di
	tingkat lapangan, petugas gizi dan kader yang aktif belum
	mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah sasaran. Sehingga,
	distribusi tugas kadang tidak seimbang dan berdampak pada
	efektivitas program
Penulis	Bagaimana dengan kebijakan yang diterapkan? Apakah cukup
	sesuai dengan kondisi daerah?
Informan	Sebagian besar kebijakan berasal dari pusat dan diturunkan dalam

	bentuk regulasi teknis. Kami tentu menyesuaikan dengan kondisi							
	lokal, namun tidak selalu mudah karena situasi di lapangan sangat							
	beragam. Contohnya, ada wilayah yang sangat tertinggal dan							
	akses ke layanan kesehatan terbatas, jadi perlu pendekatan							
	berbeda.							
Penulis	Apakah ada mekanisme evaluasi atau pemantauan terhadap							
	pelaksanaan program?							
Informan	Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,							
	biasanya tiap tiga bulan. Kami minta laporan dari puskesmas dan							
	kelurahan, lalu dievaluasi bersama dalam forum koordinasi.							
	Evaluasi dilakukan berbasis data dari e-PPGBM dan hasil							
	kegiatan Posyandu.							
Penulis	Bagaimana dengan dukungan anggaran dan logistik?							
Informan	Dukungan anggaran berasal dari APBD dan DAK non-fisik.							
	Untuk logistik seperti alat antropometri dan PMT, distribusi							
	masih belum merata. Kami juga bekerja sama dengan CSR dan							
	lembaga non-pemerintah untuk menutupi kekurangan							

TRANSKRIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Aan Rachma Evwany, Amd. AK., SKM

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Puskesmas Betungan

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Ibu, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan program penurunan							
	stunting di wilayah kerja Puskesmas Betungan?							
Informan	Di Puskesmas Betungan kami menjalankan berbagai program							
	seperti pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil,							
	penyuluhan gizi, dan edukasi ASI eksklusif. Program							
	dilaksanakan oleh tim promkes dan petugas gizi, bekerja sama							
	dengan kader Posyandu di setiap kelurahan.							
Penulis	Apakah jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas mencukupi untuk							
	menjalankan program-program tersebut?							
Informan	Sejujurnya, belum mencukupi. Kami hanya memiliki satu tenaga							
	gizi dan satu promkes. Wilayah kerja kami cukup luas, mencakup							
	beberapa kelurahan, dan kader di lapangan jumlahnya juga							
	terbatas. Sehingga, pelaksanaan program harus dilakukan							
	bergiliran.							
Penulis	Apakah masyarakat antusias terhadap program ini?							
Informan	Kesadaran masyarakat memang sudah mulai tumbuh, tapi							
	partisipasinya masih fluktuatif. Ada yang datang rutin ke							
	Posyandu, namun ada juga yang absen beberapa bulan. Kami							
	biasanya melakukan kunjungan rumah jika anak tidak datang							
	selama dua bulan berturut-turut.							
Penulis	Bagaimana proses evaluasi kegiatan dilakukan di Puskesmas							

Informan	Kami lakukan evaluasi bulanan. Kader mengirimkan data hasil						
	penimbangan dan kegiatan Posyandu, lalu kami rekap. Setiap tiga						
	bulan kami laporkan ke Dinas Kesehatan kota.						
Penulis	Bagaimana dengan dukungan fasilitas dan logistik dari Dinas						
	Kesehatan?						
Informan	Untuk alat antropometri, sebagian besar sudah diperbarui. Namun,						
	masih ada Posyandu yang menggunakan alat lama. PMT kadang						
	tersedia, tapi distribusinya belum konsisten. Kami berharap ada						
	peningkatan dari segi pendanaan operasional dan pelatihan kader						

TRANSKRIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Rita Andrinai Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kader Posyandu

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Mbak, bisa dijelaskan apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di						
	Posyandu terkait pencegahan stunting?						
Informan	Kegiatan utama kami adalah penimbangan dan pengukuran tinggi						
	badan balita setiap bulan. Selain itu, kami memberikan makanan						
	tambahan jika tersedia, dan juga menyampaikan penyuluhan						
	kepada ibu-ibu tentang pentingnya gizi, imunisasi, dan pola asuh						
	yang sehat. Kami juga mencatat hasil pengukuran di KMS						
	masing-masing anak.						
Penulis	Bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan						
	Posyandu?						
Informan	Rata-rata cukup baik, tapi memang masih ada ibu-ibu yang						
	kurang aktif datang. Biasanya mereka datang kalau ada PMT.						
	Tapi kami berusaha jemput bola, misalnya jika ada anak yang						
	tidak datang dua bulan, kami datangi ke rumah untuk						
	mengingatkan.						
Penulis	Apakah logistik seperti alat ukur dan makanan tambahan selalu						
	tersedia setiap bulan?						
Informan	Tidak selalu. Kadang kami kehabisan makanan tambahan dan						
	harus mencari alternatif seperti membuat bubur sendiri. Alat ukur						
	juga ada yang sudah rusak, tapi belum semuanya diganti. Kami						
	sudah laporkan ke Puskesmas, tapi katanya masih menunggu						
	pengadaan dari dinas.						

TRANSKRIP WAWANCARA

1. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : AY

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Masyarakat (Penerima Program)

2. HASIL WAWANCARA

Penulis	Bagaimana menurut Anda pelayanan yang diberikan oleh kader						
	Posyandu selama mengikuti kegiatan?						
Informan	Kader Posyandu sangat membantu. Mereka ramah, sabar, dan						
	selalu menjelaskan pentingnya gizi anak. Kadang mereka juga						
	bertanya langsung soal pola makan anak saya. Itu membuat						
	merasa diperhatikan. Tapi memang informasi yang diberikan						
	kadang agak terburu-buru karena banyak antrean.						
Penulis	Seberapa sering Anda datang ke Posyandu dan bagaimana						
	jumlah anak-anak yang ikut serta?						
Informan	Biasanya datang sebulan sekali. Di Posyandu banyak juga yang						
	datang, bisa sampai 40-an anak tiap kegiatan. Kadang antre						
	cukup lama, tapi masyarakat disini tetap senang ikut karena anak						
	- anak bisa ditimbang dan ibu – ibu bisa berdiskusi dengan orang						
	tua lain.						
Penulis	Apakah informasi atau penyuluhan yang disampaikan sesuai						
	dengan kebutuhan dan kondisi Anda?						
Informan	Sebagian besar cocok. Para pihak posyandu sering bahas soal						
	makanan sehat, ASI, dan pola makan anak. Tapi terkadang agak						
	bingung kalau dijelaskan pakai istilah medis. Lebih mudah kalau						
	menggunakan gambar atau ada brosur untuk dibaca di rumah.						
Penulis	Apakah Anda memiliki buku KMS dan apakah isinya dijelaskan						
	oleh kader?						
Informan	Ada punya buku KMS. Setiap selesai timbang, kader mencatat						
	dan memberi tahu kalau berat badan anak saya turun atau naik.						
	Mereka juga memberi saran, misalnya menambah konsumsi						

	telur atau sayur					
Penulis	Apakah Anda pernah menerima makanan tambahan dari					
	Posyandu?					
Informan	Pernah. Anak – anak disini dapat bubur kacang hijau dan biskuit					
	beberapa kali. Sangat membantu, apalagi jika sedang sulit beli					
	makanan bergizi. Tapi tidak selalu tersedia setiap bulan					

MATRIKS WAWANCARA

TRANSKRIP MATRIK WAWANCARA TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BENGKULU

Indikator	Aspek Penelitian	Informan	Sumber	Data	Interprestasi
			Primer	Sekunder	
Standar dan sasaran kebijakan	1. RPJMD Kota Bengkulu 2021– 2026 menetapkan penurunan stunting sebagai indikator prioritas kesehatan. 2. RKPD 2023– 2024 memuat kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.	Bapak Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM.	Berdasarkan wawancara langsung, Kepala Seksi Gizi RPJMD Kota Bengkulu 2021–2026: menetapkan penurunan stunting sebagai indikator prioritas pembanguna n bidang kesehatan, dengan target capaian tahunan dan intervensi gizi spesifik.	• RPJMD 2021–2026 • RKPD 2023 • Perpres 72/2021 • Perda 4/2018 • Laporan Dinkes 2023	Standar dan sasaran telah diatur jelas dalam dokumen daerah. Namun, pemahaman pelaksana belum merata dan koordinasi lintas sektor belum optimal. Perlu penguatan teknis dan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.
Komunikasi Antarorgani sasi	1. Kolaborasi lintas OPD dilakukan melalui forum TPPS Kota Bengkulu, sesuai amanat RPJMD 2021–2026 dalam prioritas penurunan stunting.	Bapak Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM.	• RPJMD 2021–2026 menyebutkan pentingnya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas, termasuk stunting. • RAD Stunting Kota Bengkulu menegaskan peran TPPS dalam koordinasi	• RPJMD Kota Bengkulu 2021–2026 • SK TPPS Kota Bengkulu • Notulen Rapat TPPS • Portal Berita Pemkot Bengkulu (2023– 2024)	Kolaborasi antarinstansi telah sesuai RPJMD dan difasilitasi oleh forum TPPS. Namun, belum semua OPD aktif dan masih ditemukan kesenjangan koordinasi di tingkat pelaksana. Penguatan pengawasan dan integrasi data lintas

			lintas OPD. • Perpres 72/2021 mendorong pendekatan konvergensi lintas sektor.		sektor diperlukan agar komunikasi berjalan efektif hingga tingkat kelurahan.
Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik	1. Sosial: Sosial: Menganalisis dukungan sosial terhadap implementasi kebijakan stunting. Beberapa program seperti kelas ibu hamil, pemberian PMT, dan edukasi gizi dijalankan dengan dukungan komunitas lokal. 2. Politik: Mengkaji bagaimana dukungan politik diwujudkan melalui regulasi dan anggaran. Perda No. 4/2018 dan Perpres 72/2021 dijadikan dasar hukum. Dukungan DPRD terlihat dari pengesahan anggaran stunting dalam RAPBD. 3. Ekonomi: Melihat seberapa besar alokasi anggaran untuk program penurunan stunting. Berdasarkan RKPD 2023, anggaran mencapai ±Rp 3,7	Bapak Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM.	• RPJMD menetapkan stunting sebagai isu strategis yang melibatkan peran serta masyarakat. • APBD 2023 mengalokasik an ±Rp 3,7 M untuk program stunting. • Perda No. 4 Tahun 2018 dan Perpres 72/2021 sebagai payung hukum pelaksanaan.	Perda No. 4/2018 RKPD Kota Bengkulu 2023 RAPBD 2023 Laporan DAK Nonfisik Gizi	Kebijakan sosial sudah mulai berjalan seperti kelas ibu hamil dan edukasi gizi, namun belum merata. Dukungan politik sudah cukup baik melalui Perda dan alokasi APBD. Tapi secara ekonomi, efektivitas penggunaan anggaran belum maksimal di lapangan karena masih terkendala distribusi, pelaporan, dan kapasitas kader. Dibutuhkan penguatan koordinasi antara perencana kebijakan dan pelaksana teknis.

miliar , terbagi	
untuk intervensi	
spesifik dan	
sensitif, termasuk	
operasional	
Posyandu dan	
distribusi PMT.	

MATRIKS WAWANCARA TRANSKRIP MATRIK WAWANCARA TENTANG ANALISIS

	Indikator	Aspek	Informan	Sumber Data	Interprestasi	
--	-----------	-------	----------	-------------	---------------	--

			Primer	Sekunder	
Sumber Daya	1. SDM: Jumlah kader dan petugas gizi belum mencukupi kebutuhan program stunting, terutama di wilayah padat. 2. Non-SDM: Alat ukur, media edukasi, dan PMT tidak tersedia merata di Posyandu. 3. Penguatan SDM dan logistik telah tercantum dalam RPJMD, RKPD, dan kebijakan teknis (Perpres 72/2021, DAK), namun pelaksanaanny a belum optimal.	Aan Rachma Evwany, Amd. AK., SKM	RKPD 2023 menyebutkan alokasi dana untuk pengadaan alat antropometri dan pelatihan kader. RPJMD menargetkan peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebagai indikator strategis	• RPJMD 2021–2026 • RKPD 2023 • Laporan DAK Nonfisik • Standar Layanan Gizi	Pelayanan gizi di lapangan terhambat karena minim SDM dan tidak ketersedian alat sesuai standar.
Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Penanganan stunting di Dinas Kesehatan ditangani oleh Seksi Gizi di bawah Bidang Kesehatan Masyarakat, namun koordinasi internal antarbidang masih belum	Aan Rachma Evwany, Amd. AK., SKM	• RPJMD menyebutkan bahwa pembentukan struktur pelaksana di tiap OPD mendukung pencapaian indikator prioritas. • SOP Posyandu dari Dinkes	1. Data Profil Puskesm as Betunga n Tahun 2024 2. Matriks Beban Kerja Tenaga Gizi	Distribusi SDM belum proporsional. Puskesmas dengan cakupan luas kekurangan petugas gizi dan penyuluh lapangan.

Disposisi (Sikap) Pelaksana	berjalan optimal. 2. Sistem pelaksanaan program sudah mengacu pada SOP nasional, tetapi pelaksanaanny a belum seragam di semua wilayah karena keterbatasan monitoring dan belum semua pihak memahami peran masing-masing secara sistematis. 1. Menilai bagaimana pelaksana	Aan Rachma Evwany,	tersedia, namun tidak semua wilayah menerapkann ya. • RAD Stunting menekankan peran kelembagaan sampai tingkat kelurahan. OPD non- kesehatan jarang hadir	1.Pembentuk an Tim Percepata	Koordinasi kurang aktif. Program
	memahami dan menerima kebijakan pencegahan stunting yang tertuang dalam Perpres No. 72/2021, RPJMD, dan regulasi teknis lainnya.	Amd. AK., SKM	dalam forum integrasi.	n Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bengkulu 2023	intervensi sensitif seperti sanitasi dan ekonomi rumah tangga terhambat.

Lampiran II

DOKUMENTASI



Dokumentasi pengambilan data pravelansi stunting di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Puskesmas Betungan